

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk 284 juta jiwa pada pertengahan tahun 2025, yaitu menduduki negara dengan penduduk terbanyak ke empat, setelah India, Tiongkok, dan Amerika Serikat (BPS, 2025). Negara Indonesia dituntut untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonominya melalui pembinaan berbagai pilar ekonomi yang mampu menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil serta merata. Upaya pembangunan tersebut melibatkan tiga pelaku utama dalam sistem perekonomian nasional, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut memiliki peran sebagai fondasi penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, menggerakkan produktivitas nasional, serta memastikan distribusi hasil pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh lapisan masyarakat (Supriyanto, 2019).

Perekonomian suatu negara dapat menjadi tolak ukur kehidupan bangsanya yang makmur dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang tercermin melalui kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terhadap berbagai aspek perekonomian, seperti tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, serta kinerja sektor-sektor ekonomi (Marcal, dkk., 2024). Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi suatu gambaran dari keberhasilan pemerintah dalam membangun perekonomian sebuah negara, yang merupakan sebuah komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Susilowati, dkk., 2024).

Peran koperasi dalam perekonomian sebagai pemain utama di berbagai sektor, meningkatkan pembangunan berkelanjutan melalui kebijakan yang disetujui oleh anggotanya, terdapat hubungan antara koperasi dengan pembangunan masyarakat, karena koperasi dapat diartikan sebagai wadah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan promosi pembangunan berkelanjutan masyarakat (Shava, et al., 2019). Oleh karena itu, untuk mencapai kondisi kesejahteraan masyarakat

tersebut dibutuhkan pembangunan ekonomi yang mendorong aktivitas produktif masyarakat secara berkelanjutan.

Perekonomian Indonesia disusun dan dijalankan sebagai suatu sistem yang menekankan peran serta seluruh lapisan masyarakat yang menggambarkan demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai kemakmuran bangsa. Dalam konteks inilah koperasi tumbuh sebagai wadah usaha bersama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota. Koperasi hadir dari kesadaran masyarakat untuk mendorong dirinya sendiri dan sesamanya, terutama sebagai jawaban terhadap tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial. Sejalan dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 pada Bab 1 Pasal 1, mengenai perkoperasian di mana koperasi merupakan “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi memiliki tujuan sebagaimana dikemukakan dalam Undang-Undang RI No.25 tahun 1992 yang berbunyi “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional demi mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Dalam tujuan tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia.

Koperasi merupakan badan usaha berbentuk hukum yang didirikan dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, memiliki jaringan usaha yang kuat dan berdaya saing, serta dapat melihat berbagai peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Dengan demikian koperasi memiliki posisi strategis dalam memperkuat struktur ekonomi nasional, khususnya dalam menciptakan kemandirian ekonomi yang berbasis kerakyatan yang menjalankan usahanya didasarkan atas asas kekeluargaan, yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Koperasi dalam mencapai tujuannya harus mampu mempertahankan eksistensi ditengah usahanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penanganan yang benar-benar efektif dan efisien dalam segala aspek kegiatan usahanya. Setiap koperasi diharapkan mampu menilai kondisi lingkungan organisasinya untuk mempertahankan eksistensinya yaitu dengan melakukan pengupayaan kinerja keuangan yang baik dan sehat, agar usaha koperasi terus berjalan secara berkelanjutan (Gobai, dkk., 2019).

Analisis kinerja keuangan berperan penting sebagai upaya untuk membantu manajer menilai sejauh mana kebijakan perusahaan berhasil selama periode tertentu, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk periode berikutnya. Melalui analisis ini, manajer juga dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan dengan menggunakan analisis rasio yang memperlihatkan hubungan antara data laporan keuangan, hasil interpretasi dari rasio-rasio tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan perusahaan (Samsiah, dkk., 2017).

Strategi untuk meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, dengan cara melakukan analisis mendalam terhadap kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Analisis kinerja keuangan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan operasional koperasi, sehingga dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam melakukan analisis kinerja keuangan yaitu proses pengkajian setiap elemen-elemen pada laporan keuangan yang berfungsi sebagai sumber informasi mengenai perkembangan kegiatan usaha, serta menjadi sarana pertanggungjawaban manajemen khususnya pengurus koperasi atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh pemilik, yakni para anggota koperasi (Ahmadi, 2020).

Pembentukan koperasi didorong oleh kebutuhan bersama akan pelayanan ekonomi yang lebih adil, yang tercantum di dalam prinsip koperasi. Sebagai pelaku ekonomi yang berorientasi sosial, koperasi memiliki misi sebagai stabilisator ekonomi disamping sebagai agen pembangunan. Untuk menjalankan fungsinya secara optimal, koperasi harus mampu menghasilkan laba atau SHU (Sisa Hasil Usaha) yang memadai. Kondisi koperasi dikatakan sehat apabila kinerja usahanya

menunjukkan peningkatan, yang tercermin dari tingginya tingkat rentabilitas atau profitabilitas, selain itu, kinerja keuangan koperasi yang baik mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien untuk memenuhi kepentingan anggota, dan kemampuan koperasi untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya.

Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Tasikmalaya pada akhir tahun 2024, dengan jenis koperasinya yaitu pada Tabel 1. sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis dan jumlah Koperasi di Kabupaten Tasikmalaya

No.	Jenis Koperasi	Jumlah (Unit)
1.	Koperasi Produsen	48
2.	Koperasi Pemasaran	2
3.	Koperasi Konsumen	172
4.	Koperasi Jasa	10
5.	Koperasi Simpan Pinjam	33
Jumlah		265

Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya, Tahun 2024

Berdasarkan data Tabel 1. Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 265 unit koperasi dan salah satunya adalah Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) dengan jumlah anggota atau karyawan yaitu dengan jumlah 135 orang pada akhir tahun 2024, termasuk ke dalam jenis koperasi produsen, telah lama beroperasi yaitu mulai tahun 2004 secara legal hukum. Koperasi ini dalam menjalankan usahanya selalu berusaha untuk meningkatkan laba atau hasil usahanya, untuk mewujudkan tujuan koperasi yaitu sebagai stabilisator ekonomi dan kesejahteraan anggotanya. KPPKW dengan badan hukum NO.2108/BH/PAD/KDK/.10.15/VI/2004 tanggal 07 Juni 2004. KPPKW bergerak dalam kegiatan usahanya antar lain:

1. Usaha utama perkebunan karet
2. Usaha pendukung terdiri dari:
 - a. Industri pengasapan karet
 - b. Pemanfaatan hutan kayu tanaman pada hutan produksi
 - c. Pembesaran ikan air tawar di kolam
 - d. Jasa pengolahan lahan (kemitraan karet rakyat)

- e. Perdagangan eceran berbagai macam barang makanan, dan minuman (warung koperasi)

3. Usaha tambahan Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP)

Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) dalam melakukan kegiatan perkoperasian pasti tidak akan terlepas dari kegiatan pembukuan yaitu laporan keuangan, dengan adanya laporan keuangan tersebut maka perlu dilakukannya analisis lebih lanjut untuk dapat melihat kondisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh KPPKW, supaya kinerja keuangan KPPKW tidak mengalami kemunduran dan diharapkan supaya dipertahankan atau lebih ditingkatkan. Laporan pertanggungjawaban pengurus selama enam tahun yaitu berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan SHU dan laporan keuangan lainnya. KPPKW pada tahun 2019 – 2024 dapat diketahui perkembangan atau penurunannya pada elemen-elemen laporan keuangan yaitu aktiva atau aset, kewajiban, ekuitas atau modal sendiri, SHU dan pendapatan terdapat pada Tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2. Kutipan Elemen-Elemen Neraca Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW)

No	Keterangan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Total Aktiva Lancar	1.564.012.500	1.875.172.800	1.784.182.800	1.745.232.575	1.707.390.325	1.664.122.071
2	Total Aktiva	4.037.587.600	4.132.944.640	4.042.954.640	4.006.530.415	3.817.550.165	4.026.705.911
3	Total Kewajiban Lancar	1.818.838.750	1.941.684.900	1.993.911.590	2.001.463.840	2.277.154.315	2.501.986.940
4	Total Kewajiban / Utang	1.863.838.750	1.986.684.900	2.038.911.590	2.046.463.840	2.322.154.315	2.546.986.940
5	Ekuitas	2.126.461.750	2.069.152.740	2.004.043.050	1.960.066.575	1.495.395.850	1.479.718.971
6	SHU	46.245.150	37.944.390	23.025.850	4.335.375	2.000.000	2.319.621
7	Penghasilan/ Pendapatan	2.497.626.950	2.611.058.200	2.264.596.250	2.257.996.525	1.936.901.500	2.172.223.805

Sumber : Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan 2019-2024

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa selama enam tahun terakhir, pada KPPKW terdapat kenaikan dan penurunan jumlah dari setiap elemen-elemen neraca seperti aktiva, kewajiban, SHU, ekuitas dan pendapatan. Untuk dapat melihat lebih jelas perbandingan kenaikan dan penurunan dalam persentase (%)

yaitu dengan menggunakan rumus pertumbuhan *YoY (Year over Year)*, dengan komponen variabel yang di peroleh pada Tabel 3. berikut:

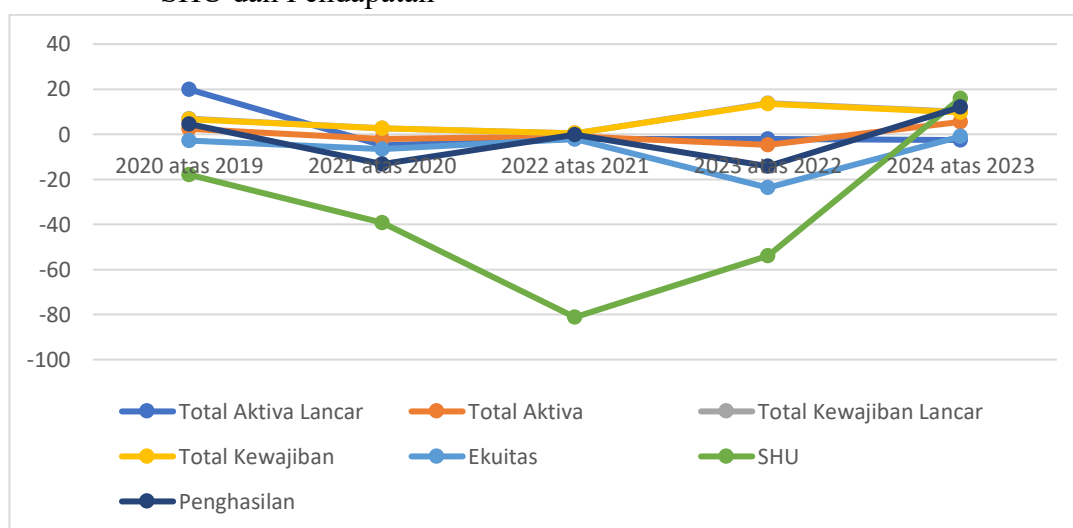
Tabel 3. Persentase Selisih Kenaikan dan Penurunan Setiap Tahun, Total Aktiva Lancar, Total Aktiva, Total Kewajiban Lancar, Total Kewajiban, Ekuitas, SHU dan Pendapatan.

No.	Keterangan	2020 atas 2019 (%)	2021 atas 2020 (%)	2022 atas 2021 (%)	2023 atas 2022 (%)	2024 atas 2023 (%)
1	Total Aktiva Lancar	19,9	(4,9)	(2,2)	(2,2)	(2,5)
2	Total Aktiva	2,4	(2,2)	(0,9)	(4,7)	5,5
3	Total Kewajiban Lancar	6,8	2,7	0,4	13,8	9,9
4	Total Kewajiban	6,6	2,6	0,4	13,5	9,7
5	Ekuitas	(2,7)	(6,6)	(2,2)	(23,7)	(1,0)
6	SHU	(17,9)	(39,3)	(81,2)	(53,9)	16,0
7	Penghasilan/ Pendapatan	4,5	(13,3)	(0,3)	(14,2)	12,1

Sumber : Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW), Data Olahan periode 2019 – 2024

Ket () : Negatif atau Turun

Gambar 1. Grafik Kenaikan dan Penurunan Setiap Tahun, Total Aktiva Lancar, Total Aktiva, Total Kewajiban Lancar, Total Kewajiban, Ekuitas, SHU dan Pendapatan



Sumber : Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW), Data Olahan periode 2019 – 2024

Berdasarkan Tabel 3. dan Gambar 1. Menunjukkan bahwa untuk total aktiva lancar terjadinya penurunan yang dinamis setiap tahunnya kecuali tahun 2020 atas tahun 2019 terjadinya kenaikan dengan persentase 19,9 persen, untuk total aktiva menunjukkan terjadinya penurunan terutama pada tahun 2023 atas tahun 2022 yaitu

sebesar 4,7 persen lalu pada tahun 2024 atas tahun 2023 terjadi kenaikan kembali sebesar 5,5 persen, untuk total kewajiban lancar setiap tahunnya terus menerus terjadinya peningkatan utang untuk persentase utang tertinggi pada tahun 2023 atas tahun 2022 yaitu senilai 13,8 persen, untuk total kewajiban atau total utang persentase tertinggi senilai 13,5 persen pada tahun 2023 atas tahun 2022, untuk ekuitas persentase penurunan tertinggi pada tahun 2023 atas tahun 2022 dengan nilai 23,7 persen, untuk SHU setiap tahunnya terjadi penurunan untuk penurunan dengan persentase terbesar terjadi pada tahun 2022 atas tahun 2021 yaitu senilai 81,2 persen, dan untuk pendapatan dari tahun 2019-2023 terjadi penurunan yang dinamis namun terjadi kenaikan kembali pada tahun 2024 dengan persentase 12,1 persen.

Penelitian mengenai kinerja keuangan di KPPKW belum pernah dilakukan pada periode 2019 sampai 2024, sehingga belum tersedia informasi yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan kinerja keuangan pada koperasi tersebut. Sementara itu, untuk penelitian-penelitian terdahulu umumnya lebih banyak dilakukan pada koperasi simpan pinjam dan koperasi konsumsi dengan periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu dengan rentang waktu tiga sampai lima tahun. Penelitian yang peneliti lakukan di KPPKW memiliki perbedaan sekaligus kebaruan dengan menganalisis kinerja keuangan KPPKW menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu selama enam tahun, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tren kinerja keuangan koperasi. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik garis (*line chart*) untuk mempermudah pemahaman terhadap perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu, serta dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya regulasi dari kementrian koperasi, agar hasil penelitian memiliki relevansi akademik dan normatif.

Analisis kinerja keuangan dalam jangka pendek (likuiditas), jangka panjang (solvabilitas), dan rentabilitas pada KPPKW menjadi sangat penting karena usaha perkebunan karet memiliki siklus pertumbuhan yang relatif panjang, yaitu dapat berproduksi sampai umur tanam 25-30 tahun (Iskandar, 2018). Dalam jangka pendek, analisis keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan koperasi dalam menjaga likuiditas dan kelancaran operasional, terutama untuk memenuhi

kewajiban rutin seperti pembiayaan pemeliharaan tanaman, pengolahan getah, distribusi hasil, upah penyadapan karet, serta pelayanan unit usaha lainnya. Mengingat KPPKW juga secara faktual memiliki utang jangka pendek dan jangka panjang, maka analisis komponen utang jangka pendek dan jangka panjang menjadi krusial untuk dinilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban tepat waktu tanpa mengganggu kegiatan operasional. Sementara itu, analisis jangka panjang diperlukan untuk menilai kemampuan koperasi dalam mengelola utang jangka panjang sebagai sumber pembiayaan investasi, seperti pengembangan lahan, penguatan struktur permodalan selama satu siklus produksi tanam, dan lain-lain. Analisis rentabilitas perlu dilakukan karena rasio ini dapat menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU, hal ini menjadi relevan dengan permasalahan yang terjadi di KPPKW, yaitu adanya penurunan SHU, sehingga dengan analisis rentabilitas dapat diketahui sejauh mana kemampuan koperasi dalam mengelola usaha dan modalnya untuk menghasilkan keuntungan yang nantinya akan berdampak pada manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota.

Berdasarkan penelitian Herdi, dkk., (2022) bahwa kinerja keuangan suatu koperasi dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas, dari hasil perhitungan ke 3 rasio tersebut untuk mengetahui sehat atau tidaknya suatu koperasi maka ditentukan dengan standar penilaian koperasi berprestasi atau kinerja suatu koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006, sehingga dapat mengetahui pemenuhan utang koperasi dalam jangka pendek, dapat mengetahui pemenuhan utang koperasi dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta mengetahui laba (SHU) yang di hasilkan dari koperasi tersebut. Dengan beberapa pengukuran tersebut sangat efisien untuk diterapkan karena dapat mengukur seberapa baik atau sehat kinerja keuangan di suatu koperasi.

Komponen variabel pada Kutipan Elemen-Elemen Neraca Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) menunjukkan terjadinya penurunan, kenaikan, dan beberapa elemen terjadinya fluktuasi, kondisi tersebut mengindikasikan mulai melemahnya struktur keuangan koperasi dan menandakan adanya ketidakseimbangan antara aset yang dimiliki dengan kewajiban yang harus

dipenuhi, melemahnya permodalan, SHU yang menurun, serta terjadinya fluktuasi pendapatan. Terjadinya penurunan, kenaikan dan fluktuasi pada 7 komponen variabel di dalam kutipan elemen-elemen neraca koperasi pada laporan keuangan KPPKW, menandakan perlunya dilakukan analisis lanjutan melalui analisis rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas dengan dilakukannya analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek dan jangka panjang, kekuatan struktur permodalannya, serta efektivitas dalam menghasilkan keuntungan, untuk menentukan kesehatan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie ditinjau dari analisis rasio dengan menggunakan standar penilaian resmi dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/M.KUKM/V/2006 yang diharapkan dapat menilai kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW).

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian terhadap kondisi kinerja keuangan koperasi menjadi penting untuk dilakukan, sebagai upaya memperoleh gambaran secara objektif mengenai keberlanjutan usaha koperasi dalam menjalankan perannya sebagai salah satu pilar perekonomian nasional. Maka dari itu urgensi dari permasalahan yang terjadi, penulis menetapkan untuk mengambil judul “KINERJA KEUANGAN KOPERASI PRODUKSI PERKEBUNAN KARET WANGUNWATIE”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio likuiditas periode 2019-2024.
2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio solvabilitas periode 2019-2024.
3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio rentabilitas periode 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio likuiditas periode 2019-2024.
2. Menganalisis kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio solvabilitas periode 2019-2024.
3. Menganalisis kinerja keuangan Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) ditinjau dari rasio rentabilitas periode 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, untuk menjadi sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kinerja keuangan koperasi khususnya penggunaan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas.
2. Bagi koperasi, sebagai masukan dan saran yang berguna bagi Koperasi Produksi Perkebunan Karet Wangunwatie (KPPKW) dan koperasi lain dalam tujuan peningkatan kinerja keuangan supaya koperasi lebih berkembang dan lebih sejahtera.
3. Bagi Akademisi, untuk menjadi bahan referensi kalangan akademik yang akan melakukan penelitian mengenai kinerja keuangan dalam pengembangan studinya.
4. Bagi pemerintah, untuk menjadi rujukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan pembinaan serta pengawasan koperasi, terkait penguatan manajemen keuangan dan pemberdayaan koperasi agar lebih stabil dan berdaya saing.